



**ANALISIS KERJA SAMA BILATERAL
INDONESIA DENGAN AUSTRALIA DALAM PENANGGULANGAN
TERORISME SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL TERORGANISIR
(2002-2015)**

Shara Yosevina Simanjuntak

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro
Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269
Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

9/11 Attack in the United States led to the international community alert to the threat of terrorism. A year later, the first Bali bombing incident occurred in 2002 with the victim as much as 202 people from 22 countries, including 88 victims are Australians. It's triggered the governments of Indonesia and Australia to cooperate on counter-terrorism. This research intends to analyze 13 years of cooperation between the two governments under three different presidents of the Republic of Indonesia from the year 2002 to 2015. The framework used was the liberalism theory in international relations with international cooperation as the concept. This type of research is descriptive with qualitative data analysis techniques through data collection from literature and documentation. This study found that the development of counter-terrorism cooperation between Indonesia and Australia are affected by the situation of national and international security, foreign policy, the background of each president, and the national identity. The cooperation that has existed for the past 13 years show no significant development other than the establishment of JCLEC in 2004, so it's necessary to form a new a new cooperation that is more preventive against the threat of terrorism in the future.

Keywords: *bilateral cooperation, counter-terrorism, Indonesia, Australia, President of the Republic of Indonesia*

PENDAHULUAN

Dewasa ini, kejahatan lintas negara atau kejahatan transnasional semakin marak diperbincangkan. Tindak kejahatan ini telah menjadi bagian dari kehidupan sosial di masyarakat. Salah satu bentuk dari kejahatan transnasional yang dibahas dalam penelitian ilmiah ini adalah terorisme. Terorisme merupakan isu kejahatan transnasional yang hangat dibicarakan sejak beberapa tahun yang lalu hingga saat ini. Isu ini memang bukan merupakan fenomena baru di kalangan dunia internasional, karena telah memiliki sejarah dan cerita yang cukup panjang. Terorisme merupakan suatu bentuk kejahatan transnasional yang sangat mengancam target utamanya. Tujuannya adalah untuk memberikan rasa takut dan terancam bagi orang-orang yang menjadi sasaran dilakukannya tindak kejahatan ini. Seringkali yang menjadi korban dari aksi para teroris ini adalah masyarakat sipil yang tidak bersalah, termasuk anak-anak dan lansia. Aksi ini dipengaruhi oleh ajaran dan ideologi yang menyimpang dan terkesan fanatis.

Aksi teroris telah terjadi di beberapa negara di dunia, misalnya seperti yang kita ketahui kasus 11 September 2001 di Amerika Serikat. Peristiwa tersebut menjadi titik balik kasus terorisme bagi dunia internasional dan khususnya Amerika Serikat. Di Asia Tenggara sendiri, kasus terorisme terjadi di Indonesia dalam peristiwa Bom Bali I di tahun 2002. Hal ini menunjukkan bahwa kasus terorisme di dunia dapat terjadi termasuk di Bali, yang notabene merupakan daerah pariwisata dan jauh dari urusan-urusan politik seperti di bagian Indonesia lainnya, misalnya ibukota Jakarta. Ironisnya, ancaman teror tersebut datang dari dalam. Para pelaku pengeboman di Bali tersebut merupakan warga negara Indonesia, yaitu kelompok Jamaah Islamiyah (JI).

Kasus terorisme di Bali ini menyebabkan ratusan korban baik WNI maupun WNA yang meninggal. Warga Negara Asing yang menjadi korban meninggal paling banyak merupakan orang Australia, bukan target serangan JI yang seharusnya warga negara Amerika Serikat. Pengeboman ini berdampak pada kerusakan lingkungan daerah wisata di Pulau Bali dan sempat menurunkan kepercayaan turis asing terhadap keamanan Indonesia. Langkah cepat yang diambil oleh pihak yang berwajib mendapat respon positif.

Menurut Prof. Richard Chauvel dalam *“Indonesia-Australia: Tantangan dan Kesempatan dalam Hubungan Politik Bilateral”* (2005: 35), dalam tempo kurang dari satu bulan, polisi mampu menyelidiki, menyidik dan menyeret para pelaku ke pengadilan. Seperti yang diduga banyak orang, suksesnya penyelidikan Bom Bali dipengaruhi oleh dukungan banyak negara, terutama Australia. Tanpa adanya bantuan dari Australia dalam penanganan kasus ini, maka respon dari pemerintah Indonesia pun tidak akan secepat ini, dan juga akan dianggap kurang efektif dan kurang meyakinkan.

Dalam penyelidikan tersebut, polisi Indonesia menerima dukungan dari banyak negara di seluruh dunia. Karena memiliki jumlah korban terbanyak, Australia termasuk negara pertama yang menawarkan bantuan dan kerja sama. Polisi Federal Australia (AFP) termasuk lembaga asing terbesar yang terlibat dalam penyelidikan (melibatkan lebih dari 80 personil), dan segera menjadi mitra kerja terdekat bagi polisi Indonesia (Chauvel, 2005: 52). Namun pada tahun 2003—setahun setelah Bom Bali I—aksi terorisme di Indonesia kembali terjadi, tepatnya di Hotel JW Marriot Jakarta. Menurut Chauvel (2005 : 54), bagi sebuah negara yang menghadapi sebuah dilema seperti Indonesia, kerja sama internasional dalam menanggulangi peningkatan kejahatan transnasional, terutama dengan tetangganya seperti Australia, mungkin adalah pilihan terbaik, dan tentu saja hal ini membuka kesempatan bagi hubungan yang lebih baik antara dua bangsa.

Respon-respon nasional dan internasional telah bermunculan dan menunjukkan keprihatinan mereka terhadap kasus terorisme. Semuanya saling bekerja sama misalnya dalam perumusan kebijakan, pengadaan undang-undang, penghukuman tindak kejahatan terorisme dan kampanye anti-terorisme. Meski begitu, masyarakat dunia belum sepenuhnya merasa aman dari potensi-potensi ancaman yang akan datang dari kelompok-kelompok teroris yang masih belum teridentifikasi keberadaannya.

Untuk itu, permasalahan penelitian ini adalah bagaimana bentuk kasus Bom Bali I yang melibatkan kerja sama kontra-terorisme antara Indonesia dan Australia dan bagaimana perkembangan kerja sama yang dilakukan pemerintah Indonesia dan Australia terkait kebijakan kontra-terorisme. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai peranan pemerintah Indonesia dalam menangani tindak terorisme serta menganalisis perkembangan kerja sama yang telah dilakukan selama 13 tahun.

Dalam kerja sama kontraterorisme dibutuhkan suatu pemikiran yang dapat dihubungkan dengan isu tersebut. Pemikiran tersebut adalah liberalisme dalam hubungan internasional. Tokoh liberalis Immanuel Kant dan Woodrow Wilson membahas apa yang disebut dengan world federation yang menginginkan ikatan persaudaraan antar umat manusia (van de Haar, 2009: 35). Kedua tokoh ini percaya bahwa setiap individu optimis terhadap

adanya perdamaian. Suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu negara adalah berasal dari individu-individu dalam pemerintahan. Maka apabila negara tersebut terlibat dalam upaya menciptakan *world federation* berarti ditentukan oleh pemerintah.

Selain itu, Andrew Moravcsik menyatakan bahwa dalam masyarakat internasional, interdependensi adalah hal yang wajar. Ia mengatakan dalam paham liberal, interdependensi dapat mengoptimalkan kerukunan antarnegara agar memperkecil adanya konflik (Moravcsik, 2001: 4). Kemudian Anne-Marie Slaughter menambahkan, liberalisme memperhatikan bagaimana sifat interdependensi dapat mendorong individu dan kelompok di suatu negara untuk berintegrasi bekerja sama dengan negara lainnya (Slaughter, 1995: 729).

Konsep selanjutnya adalah kerja sama internasional. Paham liberalisme menyatakan bahwa hubungan internasional dapat bersifat kooperatif. tentu akan lebih baik daripada hubungan internasional yang konflikual. Karena dengan kerja sama, maka akan tercipta kemajuan bagi setiap negara. Selain itu, benar apabila paham liberal percaya bahwa negara memang mempunyai banyak kepentingan nasional meski begitu kepentingan tersebut disalurkan secara kolaboratif dan kooperatif. Maka kepentingan masing-masing negara dapat tercapai melalui kerja sama.

PEMBAHASAN

Bom Bali I: Bentuk Tindak Kejahatan Terorisme sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir yang Merugikan Indonesia dan Australia

Setahun setelah Serangan 9/11, pada tanggal 12 Oktober 2002, Bali diserang aksi terorisme dengan pengeboman di tiga lokasi berbeda. Dua bom pertama meledak di Paddy's Pub dan Sari Club di Jalan Legian, Kuta, Bali, sedangkan ledakan selanjutnya terjadi di dekat kantor Konsulat Amerika Serikat, Jalan Hayam Wuruk 188, Denpasar. Korban tewas mencapai 202 orang, sebanyak 164 orang di antaranya warga asing dari 21 negara, 38 orang lainnya warga Indonesia (Liputan6, 2014). Gagasan dilakukannya serangan oleh Jemaah Islamiyah ini diawali dari operasi pertemuan rahasia di Thailand, sepuluh bulan sebelum serangan tersebut dilakukan. Riduan Isamuddin atau Hambali, mengatur sebuah strategi baru yaitu dengan menyerang target yang lebih mudah seperti klub malam dan bar daripada menyerang situs-situs kenegaraan seperti kantor kedutaan besar (BBC News, 2012).

Bali dipilih sebagai lokasi target karena lemahnya tingkat keamanan dan merupakan tujuan utama para wisatawan asing. Selain itu, didukung oleh pertimbangan bahwa sedikit kemungkinan umat Muslim menjadi korban karena populasi di Bali didominasi oleh umat Hindu (Acharya, n.d.). Sasaran dari Jemaah Islamiyah adalah untuk menyerang kepentingan-kepentingan Barat yang ada di Asia Tenggara, dalam kasus ini adalah di Indonesia. Rencana dari aksi berskala besar ini yaitu untuk menandakan peringatan satu tahun Serangan 9/11. Ledakan bom di Bali pada 12 Oktober 2002 malam tersebut adalah kejadian yang mengejutkan dan tak terduga bagi sebagian besar warga Australia dan menimbulkan banyak pertanyaan tentang kebijakan keamanan internasional dan domestik Australia, terutama sejak kampanye AS dalam menanggapi serangan 11 September 2001 (Sherlock, 2002:1).

Jemaah Islamiyah sebagai Kelompok Pelaku Tindak Pidana Terorganisasi

Jemaah Islamiyah (JI) didirikan di Malaysia pada tanggal 1 Januari 1993 oleh ulama Islam Indonesia Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir, JI adalah kelompok jihad yang terinspirasi oleh ideologi yang sama dengan al-Qaeda (Australian National Security, nationalsecurity.gov.au). JI bertanggung jawab atas serangkaian pengeboman yang menargetkan kepentingan-kepentingan Barat di Indonesia dan Filipina dari tahun 2000-2005 (US National Counterterrorism Center).

Orientasi dari organisasi JI ini adalah anti-Barat, dan serangan anti-Barat JI yang pertama kali sukses dilakukan adalah Bom Bali pada Oktober 2002 yang menewaskan 202

orang (Australian National Security, nationalecurity.gov.au). Dua lokasi kejadian, Sari Club dan Paddy's Pub di Bali dijadikan sebagai target karena dianggap sebagai tempat yang tidak mencerminkan nilai Islam (Acharya, n.d.) Dalam melakukan serangan bom tersebut, JI merangkai suatu struktur yang terorganisasi dan terencana. Struktur organisasi aksi terorisme serangan Bom Bali I terdiri dari dua ketua, dua koordinator, lima perakit bom, tiga logistik, dua orang sebagai "supporter" yang menyokong aksi serangan, dua pelaku bom bunuh diri, empat orang yang melakukan aksi pencurian untuk mendanai serangan. Berikut ini adalah keterangan tentang para pelaku Bom Bali I (The Sydney Morning Herald, n.d.).

Ketua dari kelompok ini adalah Abu Bakar Ba'asyir dan Riduan Isammudin atau Hambali. Abu Bakar Ba'asyir berperan sebagai pemimpin spiritual anggota kelompok teroris. Ba'asyir adalah imam yang mengajarkan doktrin jihad yang menyebabkan banyak pembom Bali masuk kedalam kehidupan radikalisme. Kemudian, Hambali sebagai orang yang memersatukan tim dan mengkoordinasi pendanaan. Kemudian, koordinator serangan Bom Bali I adalah Mukhlas atau Ali Ghufron dan Imam Samudra. Mukhlas mengaku menjadi kepala operasi JI, tetapi hanya sebagai pemandu spiritual para pelaku bom. Koordinator kedua adalah Imam Samudra, sebagai ahli komputer dalam aksi serangan Bom Bali. Ia memilih target dalam Bom Bali dan memimpin rapat perencanaan.

Perakit bom dalam serangan ini terdiri dari lima orang yaitu Dr. Azahari bin Husin, Dulmatin, Umar Patek, Sarjiyo atau Sawad dan Abdul Ghoni. Kemudian di bagian logistik terdiri dari Idris, Amrozi bin Nurhasyim, dan Ali Imron. Setelah penyerangan direncanakan, kemudian pelaku bom bunuh diri yang telah dipilih segera mengeksekusi rencana tersebut. Pelaku tersebut antara lain Iqbal dan Jimi. Iqbal adalah pelaku yang mengenakan bom rompi buatan ke dalam Paddy's Pub, ia menarik tali pemicu dan meledakkan bom pertama. Sedangkan Jimi adalah pelaku yang mengendarai mobil van ke Sari Club dan meledakkan bom di mobil tersebut.

Dampak Bom Bali 2002 bagi Indonesia dan Australia

Peristiwa serangan Bom Bali I tahun 2002 merenggut ratusan korban jiwa dari beberapa negara di dunia. Dari data yang tercatat (SBS News Australia, 3 September 2013), korban meninggal dengan jumlah terbesar merupakan warga negara Australia, yaitu sebanyak 88 korban jiwa. Dari total 202 jiwa, terdapat dua korban yang identitasnya tidak dapat teridentifikasi sehingga tidak diketahui kewarganegaraannya.

Dampak negatif dari pengeboman Bali tahun 2002 tersebut mempengaruhi bidang ekonomi baik daerah maupun nasional. Dalam bidang perekonomian, Indonesia mengalami kerugian di beberapa sektor yaitu pada industri pariwisata. Seperti dalam hal jumlah wisatawan mancanegara dan lokal yang berkunjung, tingkat pendapatan daerah dan jumlah pekerja di sektor pariwisata, dan masalah investasi asing di Indonesia. Jumlah wisatawan baik mancanegara maupun lokal yang berkunjung ke Indonesia, khususnya Bali, dikatakan menurun di tahun-tahun berikutnya pasca serangan bom. Hal ini berdampak pada tingkat pengangguran di Bali, karena ketika jumlah pengunjung yang datang berkurang maka hal tersebut membuat masyarakat Bali yang penghasilannya bergantung pada sektor pariwisata kehilangan pekerjaannya. Sehingga, pendapatan daerah akibat menjadi berkurang. Selain berdampak pada perekonomian daerah, serangan ini juga menyebabkan *foreign direct investment* (FDI) di Indonesia mengalami penurunan di tahun pasca terjadinya Bom Bali I.

Pengeboman di Bali tidak hanya merupakan aksi terorisme terbesar dalam sejarah Indonesia, tetapi juga salah satu serangan terbesar terhadap tujuan wisata di kawasan Asia Tenggara (Hitchcock, 2009). Ketika wisatawan mancanegara memilih suatu negara sebagai destinasi mereka, salah satu hal yang menjadi perhatian utama adalah isu keamanan di negara tersebut, apakah ada jaminan keselamatan bagi warga negara asing yang bertujuan hanya untuk melakukan perjalanan. Menurut pernyataan Pizam dan Mansfield yang dikutip oleh

Hitchcock (2009: 84), industri pariwisata dalam suatu negara akan berkembang apabila kondisi di negara tersebut tenteram. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa kestabilan politik suatu negara berpengaruh terhadap bidang pariwisata, bahkan di bidang inilah yang rentan terhadap ancaman keamanan internasional seperti aksi terorisme.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Indonesia, pada tahun 2001 Bali yang menghasilkan lebih dari 25% dari pendapatan devisa Indonesia, dan perekonomian di Bali menyumbang 1,3% dari perekonomian nasional. Setelah bom pertama pada tanggal 12 Oktober 2002, banyak negara mengeluarkan peringatan kepada warganya yang berencana untuk bepergian ke Bali, jumlah wisatawan asing yang berkunjung turun 2,3% dan jumlah devisa wisatawan mancanegara berkurang 20,2%. Pengaruh terhadap pariwisata Bali sendiri, seperti yang dikutip dari tulisan berjudul “Upaya Pemerintah Bali dalam Mengembangkan Pariwisata Pasca Bom Bali I dan II” oleh Purnamasari (2014: 352), serangan Bom Bali I mengakibatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Bali menurun sebanyak 5,23% (Dinas Pariwisata Provinsi Bali, 2005:15-16). Selain itu, berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali, jumlah tenaga kerja yang terserap mengalami penurunan menjadi 1.583.917 orang pada tahun 2003, dari sebelumnya 1.712.954 orang pada tahun 2002.

Rusmana, seperti dikutip dalam Indarti (2003), berpendapat bahwa teror bom di Bali paling tidak menimbulkan tiga hal yang memburuk. Pertama, secara ekonomi devisa menjadi berkurang. Kedua, secara politik akan ada pro-kontra mengenai tuduhan-tuduhan terhadap kelompok Islam garis keras. Ketiga, masalah keamanan menjadi semakin mengemuka, terutama bagi investor asing, sehingga beberapa investasi yang sudah mau masuk bisa berkurang (Zaqi, 2006: 47).

Bom Bali 2002 sebagai Transnational Organized Crime

Transnational organized crime atau kejahatan transnasional yang terorganisir diatur dalam *Convention of Transnational Organized Crime 2000*, konvensi ini juga sering disebut dengan Konvensi Palermo 2000. Indonesia telah mengesahkan konvensi tersebut dan tercantum pada Undang-Undang nomor 5 tahun 2009. Pada penjelasan umum pengesahan konvensi tersebut, dikatakan bahwa tindak pidana transnasional yang terorganisasi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengancam kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan perdamaian dunia. Pada pasal ke-2 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Penentangan Tindak Pidana Transnasional Terorganisasi dijelaskan bahwa:

“Kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi” berarti suatu kelompok terstruktur yang terdiri dari tiga orang atau lebih, terbentuk dalam satu periode waktu dan bertindak secara terpadu dengan tujuan untuk melakukan satu atau lebih tindak pidana serius atau pelanggaran yang ditetapkan menurut Konvensi ini, untuk mendapatkan, secara langsung atau tidak langsung, keuntungan finansial atau materi lainnya.”

Apabila disesuaikan dengan kriteria di atas, Bom Bali I dianggap sebagai TOC karena, pertama serangan ini merugikan lebih dari satu negara, tidak hanya Indonesia namun kedua puluh satu negara lainnya yang menjadi korban bom. Selain itu, meskipun bom ini dilakukan di Indonesia, tetapi bagian substansial seperti persiapan, perencanaan, pengarahannya atau pengendalian dilakukan di negara lain yaitu Malaysia, negara dimana ketua dan koordinator kelompok JI merencanakan penyerangan. Alasan ketiga adalah fakta bahwa JI merupakan kelompok kriminal yang terkait dengan kelompok al-Qaeda sebagai pelaku Serangan 9/11. Kekacauan yang diakibatkan oleh serangan Bom Bali 2002 ini juga tidak hanya merugikan satu atau dua negara saja melainkan lebih. Bahkan dapat meningkatkan kekhawatiran bangsa lain yang tidak menjadi korban. Sebelum serangan Bom Bali ini

dilakukan, tentunya terdapat proses pengumpulan dana untuk membiayai tiap-tiap persiapan dan perencanaan penyerangan. Pendanaan untuk serangan ini pun didasari oleh tindak kriminal lainnya. Pengeboman di Bali baik pada tahun 2002 maupun selanjutnya di tahun 2005, didanai dari hasil perampokan bank dan toko perhiasan serta penipuan kartu kredit (Kaplan, 2005).

Kriteria-kriteria di atas sesuai dengan fakta yang terdapat pada kasus serangan Bom Bali tahun 2002. Peristiwa serangan bom di Bali pada tahun 2002 oleh kelompok teroris JI ini merupakan salah satu kejahatan lintas negara yang terorganisir yang memerlukan strategi serta teknologi yang rumit. Serangan bom ini mengancam kesejahteraan seluruh masyarakat baik Indonesia maupun warga asing, hal ini dikarenakan jangkauan dari kelompok teroris JI sangat luas. Tidak hanya menjadi ancaman bagi kawasan Asia Tenggara, namun juga dapat membahayakan keamanan bangsa lain karena JI memiliki jaringan kelompok teroris lainnya di beberapa negara di dunia.

Kesepakatan Kerja Sama Bilateral Penanggulangan Terorisme antara Indonesia dengan Australia tahun 2002-2004 pada Periode Kepresidenan Megawati Soekarnoputri

Masa kepemimpinan Presiden Megawati dimulai di tahun 2001 kemudian setahun setelah itu terjadi peristiwa Bom Bali I. Namun sebelum kejadian tersebut, Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Megawati menjalin hubungan kerja sama bilateral dengan Australia dalam bidang pemberantasan terorisme. Pasca Serangan 9/11 beberapa negara di dunia bekerja sama satu dengan yang lainnya, termasuk Indonesia dan Australia. Maka pada tanggal 7 Februari 2002, delapan bulan sebelum Bom Bali I, telah ditandatangani *Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Australia on Combating International Terrorism*, berlaku mulai pada tanggal penandatanganan dan berlaku selama satu tahun namun dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak (treaty.kemlu.go.id, 2002). Nota Kesepahaman ini berisikan tentang kesadaran kedua pemerintah bahwa diperlukan penguatan kerja sama internasional secara komprehensif dalam hal pemberantasan terorisme, mengingat kemungkinan adanya ancaman terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat kedua negara. Dengan alasan tersebut Indonesia dan Australia ingin meningkatkan kerja sama kontra-terorisme antara lembaga masing-masing negara di bidang pertahanan, keamanan, intelijen dan penegak hukum.

Pasca terjadinya serangan bom di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, polisi-polisi Indonesia dan Australia segera mendatangi lokasi kejadian, menyediakan bantuan bagi korban-korban yang cedera. Dalam hitungan jam setelah ledakan, peraturan kerja sama antara kepolisian Indonesia dan Australia dibuat dengan menghasilkan perjanjian pembentukan operasi gabungan pada tanggal 18 Oktober 2002 (AFP Annual Report 2002-2003). Dipimpin oleh AFP, penyelidikan dilakukan dengan mengerahkan sekitar 500 anggota polisi Australia. Dalam operasi gabungan ini Federal Bureau of Investigation (FBI) merupakan salah satu mitra kunci dan kontributor yang terpenting selama penyelidikan. Respon AFP dalam membantu Polri menginvestigasi aksi teroris ini membutuhkan keterlibatan dan koordinasi polisi termasuk penyelidikan, intelijen, identifikasi korban dan identifikasi khusus, penyelidikan forensik, data bom, serta fungsi kepolisian dalam menghubungi keluarga korban (AFP Annual Report, afp.gov.au). Kerja sama kedua kepolisian ini terbukti dengan penjatuhan hukuman terhadap lebih dari 30 teroris, termasuk tujuh pelaku utama bom, lebih tepatnya dalam dua tahun sejak peristiwa bom 36 orang yang telah ditangkap dan 33 orang yang sudah divonis di tahun 2004 (policechiefmagazine.org, 2004).

AFP membentuk sebuah operasi gabungan secara permanen yang diberi nama Jakarta Operations Centre, yang kemudian berganti nama menjadi Jakarta Regional Cooperation Team tahun 2007. Kelompok yang diinisiasikan oleh AFP ini menawarkan bantuan untuk

operasi kontra-terorisme yang dilakukan oleh Polri. Selain itu pada tanggal 2 Juli 2004, dibuka secara resmi Transnational Crime Centre di Jakarta, Indonesia yang akan membantu memperkuat upaya penegakan hukum untuk melawan kejahatan lintas negara di kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya.

Di bulan Februari 2004, Menteri Luar Negeri Indonesia dan Australia yaitu Hassan Wirajuda dan Alexander Downer, keduanya memimpin pertemuan BRMMCT di Indonesia. Pertemuan ini dihadiri oleh menteri luar negeri dan kepala penegak hukum negara partisipan. 'Bali Counter-Terrorism Process' menunjukkan bahwa forum tingkat regional yang didedikasikan untuk menghadapi ancaman teroris dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya kontra-terorisme secara global. 'Bali Counter-Terrorism Process' telah menguatkan tekad pemerintah tiap-tiap negara yang terlibat agar siap menghadapi ancaman yang akan datang dengan berbagai cara dan tindakan pada tingkat domestik dan internasional. JCLEC, sebagai salah satu contoh kerja sama kontra-terorisme yang diupayakan oleh Indonesia dengan Australia, akan terus memberikan pelatihan terstruktur bagi para praktisi penegak hukum di kawasan Asia Pasifik dan menyediakan tempat untuk penyelenggaraan berbagai lokakarya tingkat regional, dengan fokus yang kuat pada isu kontra-terorisme (asean.org, 2012: 1).

Protokol Polri dan AFP dibuat untuk mendirikan Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC) yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 21 April 2004 dan diratifikasi di Melbourne pada tanggal 29 April 2004. Akte Pendirian JCLEC adalah tertanggal 28 Februari 2005 (treaty.kemlu.go.id), dan didirikan di Semarang, Jawa Tengah. Kerja sama ini semakin menciptakan kesempatan untuk melakukan pelatihan dan pengawasan oleh Australia bagi penegak hukum Indonesia. Peran JCLEC adalah memberikan pendidikan dan pelatihan dengan fasilitas bertaraf internasional bagi aparat penegak hukum Indonesia. Pelatihan ini berguna untuk investigasi kejahatan transnasional dengan fokus pemberantasan terorisme. (jclec.com, 2005: 2).

Kesepakatan Kerja Sama Bilateral Penanggulangan Terorisme antara Indonesia dengan Australia tahun 2004-2014 pada Periode Kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono

Dalam mewujudkan kerja sama antara lembaga penegak hukum dari kedua negara, diberlakukan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth of Australia tentang Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara dan Pengembangan Kerjasama Kepolisian. Latar belakang disepakatinya Nota Kesepahaman ini adalah dari kesadaran Pemerintah RI dan Australia atas semakin meningkatnya ancaman kejahatan lintas negara yang bersifat kompleks sehingga penanggulangan yang berhasil memerlukan kerja sama internasional. Keputusan ini dibuat untuk melanjutkan dan meningkatkan kerja sama yang sudah ada dalam bentuk kerja sama teknis di bidang pertukaran informasi intelijen, pelaksanaan operasi bersama dan pengembangan kemampuan lainnya (treaty.kemlu.go.id, 2005).

Pada tanggal 13 November 2006 tepatnya di Mataram, Lombok, ditandatangani Persetujuan antara Republik Indonesia dan Australia mengenai Kerangka Kerja Sama Keamanan yang baru mulai diberlakukan pada 7 Februari 2008. Selain itu ditandatangani Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth of Australia tentang Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara dan Pengembangan Kerjasama Kepolisian, Pengaturan antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepolisian Federal Australia tentang Kerja Sama dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara, serta konsep-konsep kerja sama lainnya secara tertulis (treaty.kemlu.go.id).

Kegiatan kerja sama lainnya antara Indonesia dan Australia dalam kontra-terorisme adalah penyelenggaraan program Post Blast Incident Management pada tanggal 12 sampai dengan 23 Juni 2006. Program ini diadakan bersama AFP, khususnya dari Departemen Kontra

Terorisme Forensik, agar dapat dipastikan setiap kegiatan dalam program ini memiliki standar internasional. Kemudian di bulan berikutnya, diadakan pelatihan identifikasi korban (DVI) dan pelatihan investigasi tempat kejadian perkara (TKP) yang dipandu oleh para pelatih yang berasal dari Australia yaitu AFP, Kepolisian New South Wales dan Kepolisian Queensland bersama Tim DVI Polri sendiri (jclec.com, 2006: 1).

Sasaran JCLEC untuk meningkatkan pelatihan dan kesiapan penegakan hukum Indonesia yang bertujuan menangani kejahatan lintas negara dan terorisme di wilayah ASEAN dan Asia Pasifik, dicapai dengan cara memperkuat kapasitas respon penegak hukum, untuk menangkal serta menghadapi terorisme dan kejahatan lintas negara lain; memperkuat pembentukan dan pengembangan kapabilitas manajemen investigasi; memberikan kontribusi terhadap perkembangan keterampilan intelijen kriminal yang lebih luas dan kapasitas untuk berbagi dan bertukar intelijen kejahatan, serta mengelola prosesnya; meningkatkan kemampuan forensik dan manajemen forensik; menguatkan kemitraan dan jaringan penegakan hukum yang telah ada atau yang sedang berkembang di tingkat domestik dan internasional; memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi; serta mempengaruhi lingkungan perundang-undangan dan kebijakan (JCLEC Annual Report, 2011: 11). Tujuan pelatihan AFP di JCLEC adalah untuk memberikan program pendidikan penegakan hukum internasional yang luas untuk membantu perkembangan Polri, lembaga penegakan hukum lain dan lembaga penegakan hukum di kawasan agar berhasil dalam menghadapi kejahatan lintas negara, yang tidak hanya terjadi di dalam yurisdiksi mereka tetapi juga memengaruhi negara-negara lain.

Kesepakatan Kerja Sama Bilateral Penanggulangan Terorisme antara Indonesia dengan Australia tahun 2014-2015 pada Periode Kepresidenan Joko Widodo

Beralih ke masa pemerintahan saat ini di bawah kepresidenan Joko Widodo, kerja sama yang dilakukan antara pemerintah Indonesia dan Australia terdiri dari perjanjian yang melibatkan AFP dan Polri, penandatanganan nota kesepahaman, pelaksanaan forum dan *workshop*, serta kerja sama dalam rangka pencegahan pembiayaan terorisme. Pengaturan antara Kepolisian Federal Australia (AFP) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang kerja sama dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan lintas negara, ditandatangani pada tanggal 3 Agustus 2015 di Jakarta (treaty.kemlu.go.id). Pengaturan ini sesuai dengan maksud dan tujuan dari Perjanjian Lombok tahun 2006, sehingga ditegaskan kembali kode etik antara kedua pihak dan berkeinginan untuk mengembangkan kerja sama dan konsolidasi antara kepolisian RI dan Australia. Dalam perjanjian ini dipertegas bahwa kedua pihak mengakui prinsip kemerdekaan, non-intervensi, kesetaraan, hubungan timbal balik serta menghormati hak-hak terhadap kedaulatan negara dan keutuhan wilayah masing-masing.

Kemudian, Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia tentang Pemberantasan Terorisme Internasional ini ditandatangani pada tanggal 21 Desember 2015 (treaty.kemlu.go.id). Dalam MoU ini, kedua pemerintah menyadari bahwa aktivitas lintas batas antara Indonesia dan Australia dapat menimbulkan ancaman yang nyata terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat kedua negara. Oleh sebab itu kedua pihak mengakui bahwa dibutuhkan penguatan kerja sama internasional di segala tingkatan seperti kementerian luar negeri, pertahanan, keamanan, intelijen dan lembaga penegak hukum dari kedua pemerintahan dalam memerangi terorisme secara komprehensif. Realisasi konsep kerja sama ini sudah tercakup dalam kegiatan-kegiatan JCLEC sebagai pusat kerja sama penegakan hukum antara Indonesia dan Australia.

Indonesia dan Australia sepakat meningkatkan kerja sama secara komprehensif untuk mengatasi ekstremisme dan terorisme. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam pertemuan antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan masing-masing negara yang diselenggarakan di Sydney, Australia dan juga dalam pertemuan Dewan Menteri Indonesia-

Australia dalam bidang hukum dan keamanan yang berlangsung di Jakarta. Pada dua pertemuan ini, kedua negara sepakat bekerja sama memperkuat kapasitas nasional masing-masing pada bidang kontra-terorisme dan kejahatan lintas batas, termasuk *foreign terrorist fighters*, kejahatan *cyber*, dan kerja sama intelijen (tempo.co, 2015). Tidak hanya itu, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) Indonesia beserta Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) atau Badan Pemberantasan Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme Australia menjadi tuan rumah bersama untuk forum regional pertama yang berlangsung di Sydney yang membahas masalah pemberantasan pembiayaan terorisme. Forum ini bertujuan untuk meningkatkan upaya-upaya bersama negara-negara di kawasan Asia Pasifik dalam menelusuri pembiayaan terorisme dan hasil kejahatan melalui sejumlah saluran keuangan. Kerjasama ini diperlukan untuk menghadapi ancaman terorisme dan memerangi kejahatan lintas-batas di bagian-bagian kritis kawasan Asia Pasifik (radioaustralia.net, 2015).

PENUTUP

Kerja sama dapat dikategorikan kedalam dua bentuk yaitu *strategic plan* dan *action*. Kerja sama dalam bentuk *strategic plan* misalnya seperti *MoU*, perjanjian, dan sebagainya. Sedangkan kerja sama dalam bentuk *action* lebih kepada operasi gabungan, pendirian badan atau lembaga, dan penyelenggaraan forum atau pertemuan. Di bawah kepemimpinan Presiden Megawati, *strategic plan* yang dilakukan adalah disepakatinya berbagai *Memorandum of Understanding (MoU)* dan konsep kerja sama lainnya. Sedangkan dalam bentuk *action*, dibentuk Operasi Gabungan investigasi Bom Bali hingga pada tahun 2004 didirikan JCLEC di Indonesia sebagai pusat kerja sama penegakan hukum antara kepolisian Indonesia-Australia, POLRI dan AFP. Ketika Presiden Yudhoyono menjabat, melalui agenda kerjanya yang mengutamakan citra Indonesia di kancah internasional, pemerintah Indonesia lebih fokus kepada *strategic plan* dengan meneruskan perjanjian-perjanjian kerja sama bilateral termasuk dengan Australia dalam hal keamanan dan kontra-terorisme. Dengan didirikannya JCLEC, pemerintah hanya perlu meningkatkan kualitas pusat tersebut dengan melengkapi fasilitas JCLEC tanpa harus membangun badan-badan sejenis lainnya.

Sedangkan pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang belum genap dua tahun, sementara ini belum ada bentuk baru dari kerja sama kontra-terorisme antara Indonesia dan Australia semacam JCLEC. Hal ini dapat dipahami perbedaannya dibandingkan ketika periode Presiden Megawati, dimana saat itu terdapat isu terorisme di Indonesia yang melibatkan Australia seperti Bom Bali I tahun 2002 dan serangan bom Kedubes Australia di Jakarta tahun 2004. Namun telah disepakati kerja sama antara Indonesia dan Australia dalam pencegahan munculnya kelompok-kelompok terorisme baru yang didanai oleh pihak-pihak tertentu. Maka AUSTRAC dan PPATK melakukan kerja sama dengan cara *information sharing* melalui para intelijen.

Perbedaan yang jelas pada kerja sama antara Indonesia dengan Australia di bawah periode kepemimpinan presiden yang berbeda adalah dari bentuk kerja samanya. Ketika Presiden Megawati menjabat, dibentuk operasi gabungan antara AFP dan POLRI dimana operasi gabungan ini menandakan bahwa kerja sama yang dilakukan lebih kepada penanganan dan investigasi kasus terorisme, sedangkan di periode presiden selanjutnya kerja sama penegakan hukum antara Indonesia dan Australia bersifat pencegahan dan memperkuat keamanan. Hal ini menjadi bukti bahwa kerja sama yang dilakukan pemerintah satu negara dengan yang lainnya sangat dipengaruhi oleh situasi keamanan negara, politik luar negeri yang ditetapkan masing-masing presiden, latar belakang presiden dan identitas nasional.

Referensi

- Acharya, Arabinda. *"The Bali Bombings: Impact on Indonesia and Southeast Asia"*. Hudson Institute Center for Eurasian Policy Occasional Research Paper.
- "AFP Supports Transnational Crime Centre in Indonesia"*. (2 Juli 2004). Australian Federal Police. <http://afp.gov.au>. Diakses 10 April 2016.
- Arnold, Wayne. (4 Oktober 2005). *"This Bali Bombing Seen as Having Less Economic Effect"*. International New York Times. Dalam <http://nytimes.com>. Diakses 14 Mei 2015.
- "Asia-Pacific Anti-Terror Training Centre Opens in Indonesia"*. (4 Juli 2004). JCLEC News. Dalam <http://jclec.com> Diakses 13 Maret 2016.
- ASEAN. (4 Juli 2012). *"Bali Regional Ministerial Meeting on Counter-Terrorism Bali, Indonesia, 5 February 2004 Co Chairs' Statement"*.
- Basis Data Perjanjian Internasional. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Dalam <http://treaty.kemlu.go.id>
- "Bali bombings have grave affects on the economy"*. (22 Oktober 2002). PM, ABC Local Radio. Dalam <http://abc.net.au> Diakses 13 Maret 2016.
- "Bali Regional Ministerial Meeting on Counter-Terrorism"*. (5 Februari 2004). Australian Ministers for Foreign Affairs Archive. Dalam <http://foreignminister.gov.au>. Diakses 7 Mei 2015.
- BBC News. *"12 October 2002 bombing plot"*. (11 Oktober 2012). <http://www.bbc.com/news/world-asia-19881138>. Diakses 7 Mei 2015.
- Beirman, David. (12 Oktober 2012). *"Ten Years on: the Significance of the Bali Bombings for the Tourism Industry"*. ETN Australia. HYPERLINK "<http://eturbonews.com>" <http://eturbonews.com> Diakses 14 Mei 2015.
- Bradsher, Keith, Neela Banerjee. (15 Oktober 2002). *"Indonesia Stocks Fall 10%; Others in Asia Off Modestly; Severe Tourism Losses Seen"*. The New York Times. HYPERLINK "<http://nytimes.com>" <http://nytimes.com> Diakses 20 Maret 2016.
- Chauvel, R. (2005). *Indonesia-Australia: Tantangan dan Kesempatan dalam Hubungan Politik Bilateral*. Jakarta: Granit.
- "Counter-Terrorism Financing Summit 2015". (November 2015). Australian Transaction Reports and Analysis Centre. <http://austrac.gov.au> Diakses 20 Maret 2016.
- "Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US\$)"*. World Development Indicators. United Nations Data. Dalam HYPERLINK "<http://data.un.org>" <http://data.un.org>
- Gunawan, Rizki. (12 Oktober 2014). *"12-10-2002: Bom Bali I Renggut 202 Nyawa"*. Liputan6. HYPERLINK "<http://news.liputan6.com>" <http://news.liputan6.com> Diakses 20 Maret 2016.
- Guscott, W.M. et al. (2007). *"The Bali bombings and the evolving mental health response to disaster in Australia: lessons from Darwin"*. Northern Territory: Blackwell Publishing Ltd.
- Gyngell, A. (2008). *Australia as an Asia Pacific Regional Power; Friendship in Flux*. New York: Routledge.
- "Impact of the Bali Bombing"*. (24 Oktober 2002). International Crisis Group. HYPERLINK "<http://crisisgroup.org>" <http://crisisgroup.org> Diakses 9 oktober 2015.
- "Indonesia dan Australia Sepakat Berantas Terorisme". Tempo. (22 Desember 2015). <http://nasional.tempo.co>
- "JCLEC Hosts the Regional Workshop on Foreign Terrorist Fighters: Strengthening Legal Frameworks. (7 Oktober 2015). JCLEC News. <http://jclec.com> Diakses 9 oktober 2015.
- Jackson, R., & Sorensen, G. (2005). *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jakarta Centre For Law Enforcement Cooperation. Annual Report 2006. <http://jclec.com>
- Jakarta Centre For Law Enforcement Cooperation. Annual Report 2011. <http://jclec.com>

- “Jemaah Islamiyah (JI)”. Australian National Security. <http://nationalecurity.gov.au>
- “Jumlah Wisatawan Asing Tahun 1974 – 2013, Devisa Wisman 1998 – 2013 dan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Bintang dan Non Bintang Tahun 1985-2013”. Badan Pusat Statistik Indonesia. Dalam <http://bps.go.id>
- "Kilas 2015: Kerjasama Pencegahan Pembiayaan Terorisme Indonesia - Australia Diperluas ke Asia Pasifik". Radio Australia. (31 Desember 2015). <http://radioaustralia.net> Diakses 31 Maret 2016.
- Lawler, John. (Agustus 2004). "The Bali Bombing: Australian Law Enforcement Assistance to Indonesia". The Police Chief. <http://policechiefmagazine.org> Diakses 9 oktober 2015.
- "Mega Opens Antiterror School in Semarang". (4 Juli 2004). JCLEC News. <http://jclec.com> Diakses 9 oktober 2015.
- McMillan, Ian. (Desember 2002). "*Knock-on Effects of Bali Attacks Expected*". Mental Health Practice, Vol 6 No 4.
- Mustika, Made Dwi Setyadi. "Investasi Swasta Sektor Pariwisata dan Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Bali". Jurnal Ekonomi dan Sosial. Universitas Udayana.
- Park, Andy. (3 September 2013). "*Bali bombings: Full list of victims' names*". SBS News Australia. <http://sbs.com.au> Diakses 14 Maret 2016.
- Pazos, Rodolfo, Michael Bachelard dan Andrew Forbes. "*The first Bali bombing: ten years on*". The Sydney Morning Herald. <http://smh.com.au> Diakses 14 Maret 2016.
- Zaqi, Mochamad. (2006). "Reaksi Pasar Modal Indonesia terhadap Peristiwa-peristiwa Ekonomi dan Peristiwa-peristiwa Sosial—Politik Dalam Negeri". Universitas Diponegoro.